

# K.H. A. WAHID HASYIM

## Muslim Demokrat

### Peletak Fondasi Departemen Agama

Oleh Saiful Umam

**K**H. Abdul Wahid Hasyim adalah salah satu dari sedikit tokoh NU yang menonjol dan ketokohnya tidak hanya diakui kalangan NU tapi juga kalangan di luarnya. Ada banyak faktor yang menyebabkannya menjadi seperti itu. Selain karena putra K.H. Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim—demikian ia lebih dikenal—adalah orang yang sangat cerdas dan gemar sekali membaca. Berkat kecerdasan dan kegemarannya tersebut, ia mempunyai pemikiran yang maju, terlebih jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh NU pada masa itu, dan mampu mengikuti perkembangan yang terjadi sehingga dapat “duduk sejajar” dengan tokoh-tokoh nasional yang mendapat kesempatan belajar di bangku sekolah modern.

Bagi kalangan NU, peran Wahid Hasyim di NU saya kira sudah cukup tidak perlu diragukan. Untuk itu dalam tulisan ini saya lebih menyoroti peran penting yang telah dimainkannya di luar organisasi NU. Beberapa hal yang perlu dicatat di sini adalah perannya dalam memobilisasi para kiai pada masa penjajahan Jepang, sehingga mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik—suatu hal yang tidak pernah terjadi pada masa penjajahan Belanda. Kedua, peran dia pada masa awal kemerdekaan, di mana dia turut menyelamatkan persatuan bangsa, dan ketiga ketika ia berhasil membangun

dan mengembangkan Kementerian Agama (sekarang adalah Departemen Agama) sehingga menjadi kementerian yang sejajar dengan kementerian-kementerian lainnya.

Sebelum membahas ketiga peran penting tersebut, terlebih dahulu saya akan melihat sejarah hidupnya agar dapat lebih memahami mengapa Wahid Hasyim mampu memainkan peranan penting seperti itu.

*Saiful Umam adalah Alumnus Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen, Pati, menyelesaikan S1 di LAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan meraih gelar MA dalam bidang Sejarah Timur Tengah dari Princeton University, New Jersey, USA pada tahun 1996. Sekarang bekerja sebagai pengajar di LAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan aktif menulis di berbagai media massa.*

#### **Pribadi yang Cerdas dan Gemar Membaca**

Wahid Hasyim datang dari keluarga yang sangat dihormati. Ayahnya adalah K.H. Hasyim Asy'ari, ulama kharismatis yang terkenal ahli dalam bidang hadits dan tafsir. Bagi kalangan santri di Jawa dan pulau-pulau lain, nama Hasyim Asy'ari sangat dikenal luas dan dihormati. Bukan saja karena dia adalah pendiri dan sekaligus pengasuh Pondok

Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, tapi juga ilmunya memang sangat dalam. Untuk itulah dia sering dipanggil *Hadratus Syaikh*, guru yang mulia, di kalangan para santri. Ini menunjukkan tingginya penghormatan mereka kepada kiai ini. Pengaruh K.H. Hasyim Asy'ari makin meluas karena banyak santrinya yang kemudian mendirikan pesantren setelah *ngaji* dengan beliau. Selain sebagai kiai, dia juga dikenal sebagai salah satu pendiri dan Rais 'Aam pertama Nahdlatul Ulama.<sup>1</sup>

K.H. Hasyim Asy'ari diceritakan memiliki lebih dari satu istri dan yang melahirkan Wahid Hasyim, adalah Nafiqah putri Kyai Iljas, pemimpin Pesantren Sewulan Madiun. Ini berarti dari kedua jalur, Wahid Hasyim adalah keturunan kiai. Meski bukan satu-satunya yang membentuk kepribadiannya, faktor genealogis ini menjadi cukup penting untuk memahami pribadi Wahid Hasyim, khususnya dalam hal kekentalannya dengan nilai-nilai Islam dan kecerdasannya yang luar biasa.

Wahid Hasyim adalah anak kelima dari pasangan K.H. Hasyim Asy'ari dan Nafiqah, dan merupakan anak laki-laki pertama dari 10 bersaudara. Dia dilahirkan pada hari Jum'at, 1 Juni 1914, di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.<sup>2</sup> Nama aslinya adalah Abdul Wahid, tapi ketika menginjak dewasa dia lebih suka menulis namanya dengan A. Wahid dan ditambah nama ayahnya dibelakangnya, sehingga menjadi A. Wahid Hasyim. Dan kemudian, dia lebih dikenal dengan Wahid Hasyim.

Sebagai anak seorang kiai terkenal, Wahid Hasyim tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pesantren yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan dasarnya dilalui di

lingkungan rumahnya. Pagi hari belajar di madrasah yang ada di lingkungan pesantren orangtuanya, sementara malam hari belajar langsung dengan ayahnya. Kegiatan ini dijalannya sampai usia 12 tahun.

Wahid Hasyim kecil adalah anak yang sangat cerdas dan gemar membaca. Dia tidak pernah mondok dalam pengertian yang sebenarnya, sebagaimana kebiasaan anak-anak kiai saat itu dan bahkan sampai sekarang. Dia sempat mondok di Pondok Siwalan Pandji, Sidoarjo, tapi hanya dalam hitungan hari. Demikian pula yang terjadi ketika dia mencoba mondok di Lirboyo, Kediri. Tapi berkat kecerdasan dan kegemarannya membaca, dia belajar banyak hal secara otodidak. Jadi, meski tidak pernah mondok, pada usia 16 tahun dia sudah mampu mengajar beberapa kitab, seperti *al-Durar al-Bahiyah* dan *Kafrawi*.

Belajar secara otodidak juga dia lakukan dalam bidang-bidang lain, seperti baca tulis huruf Latin, bahasa Belanda dan Inggris. Dengan demikian, meski dia tidak pernah belajar di sekolah umum, dia menguasai ketiga bidang tersebut. Dia belajar sendiri dengan jalan berlangganan majalah-majalah dan membaca buku-buku yang ditulis dalam huruf Latin, baik berbahasa Melayu, Belanda, maupun Inggris. Di antara majalah yang dia berlangganan adalah *Penjebat Semangat*, *Daulat Rakjat*, *Pandji Pustaka*, *Sumber Pengetahuan*, di samping majalah-majalah berbahasa Arab, seperti *Ummul Qura* dan *Shautul Hijaz*.

Dalam usia 15 tahun, Wahid Hasyim betul-betul mulai keranjingan membaca. Dan karena kegemaran inilah matanya menjadi agak rusak sehingga harus memakai kacamata. Namun hal itu tidak mengurangi minatnya, bahkan makin bertambah. Beruntung, dia adalah anak seorang

<sup>1</sup> Untuk memahami lebih detail tentang peran dan kehidupan K.H. Hasyim Asy'ari, lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 92-99.

<sup>2</sup> Tanggal lahir di sini merujuk pada Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar* (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasyim, 1957), hal. 141. Namun ada pula yang menulis bahwa Wahid Hasyim dilahirkan pada 12 Februari 1913. Lihat, misalnya, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995), pada bagian Biodata Anggota BPUPKI dan PPKI.



kiai terkenal yang secara ekonomi kecukupan, sehingga kebiasaan ini tentu saja tidak menjadi masalah. Bagi banyak orang, dalam masa itu, mendapatkan bacaan-bacaan seperti tersebut tadi jelas bukan suatu hal yang mudah dan murah. Tapi dia bisa mendapatkannya secara berkala.

Wahid Hasyim mengakhiri masa lajangnya pada usia sekitar 25 tahun dengan menikahi Solehah binti K.H. Bisyr Syamsuri—pendiri dan pemimpin Pesantren Denanyar, Jombang serta salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan pernah juga menjadi Rais 'Aam PBNU. Dari perkawinan ini Wahid Hasyim dikaruniai 6 anak, 4 putra dan 2 putri. Masing-masing adalah Abdurrahman Ad-Dachil (sekarang lebih dikenal dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur), A'isjah, Salahuddin al-

Ayyubi, 'Umar, Chadijah, dan Hasyim. Sayang sekali, Wahid Hasyim tidak sempat mendidik anak-anaknya lebih lama karena ia meninggal dunia dalam usia relatif muda, 39 tahun, tepatnya pada 19 April 1953. Bahkan anak bungsunya lahir setelah dia meninggal. Namun kecerdasannya yang luar biasa tadi dan kepandaianya berorganisasi paling tidak diwarisi oleh anak sulungnya yang sekarang menjadi Ketua Umum PBNU.

### **Memasyarakatkan Budaya Baca**

Berkat kecerdasan dan kegemarannya membaca, Wahid Hasyim menjadi sosok santri yang berwawasan luas. Hal ini dapat dilihat, misalnya pada 1935, bersama KH. Iljas, Wahid Hasyim mendirikan Madrasah Nizamiyah yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama tapi juga ilmu-ilmu umum, termasuk bahasa Belanda dan Inggris. Pada saat itu, pelajaran umum masih dianggap tabu oleh pesantren karena dipandang identik dengan Barat atau penjajah yang memperkenalkan ilmu tersebut ke Indonesia. Kebencian mendalam terhadap penjajah membuat pesantren mengharamkan semua yang berkaitan dengannya, seperti memakai dasi dan topi, di samping ilmu pengetahuan umum tersebut. Tidak mengherankan bila Wahid Hasyim, khususnya, dan pesantren Tebuireng, umumnya, kemudian mendapat kritikan banyak pesantren karena langkah baru tadi. Namun Wahid Hasyim dengan yakin melanjutkan usahanya ini, karena dia melihat bahwa tidak semua yang datang dari Barat itu jelek atau tercela, apalagi dalam hal ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan betapa luasnya wawasan Wahid Hasyim, sebagaimana terbukti bahwa apa yang dilakukannya pada waktu kemudian diikuti oleh sebagian besar pesantren lainnya.

Wahid Hasyim juga mendirikan taman bacaan di lingkungan pesantrennya. Semua buku dan majalah yang dia punyai ditempatkan dalam perpustakaan dan dia menganjurkan para santri untuk membacanya. Apa yang dilakukan Wahid

Hasyim ini pada dasarnya adalah untuk mendukung idenya bahwa umat Islam, apalagi para generasi muda, harus banyak membaca. Dari bahan-bahan bacaan yang dibaca, Wahid Hasyim berpendapat bahwa umat Islam terbelakang dan dikuasai umat yang beragama lain karena kurang membaca.

Selain itu, Wahid Hasyim juga mendirikan Ikatan Pelajar-Pelajar Islam pada 1936. Meski sifatnya lokal, namun anggotanya konon mencapai lebih dari 300 orang. Tujuan utama dari dibentuknya organisasi ini adalah, sekali lagi, untuk memasyarakatkan budaya baca di kalangan para anggotanya. Bermula dari organisasi kecil inilah Wahid Hasyim kemudian melanjutkan keterlibatannya dalam organisasi-organisasi berskala nasional, seperti NU dan Masyumi.

Aktivitas Wahid Hasyim di NU dimulai pada 1938. Sebagai anak dari salah satu pendiri dan sekaligus Rais 'Aam Nahdlatul Ulama, wajar kalau Wahid Hasyim memilih organisasi ini. Bahkan tidak terbayangkan seandainya Wahid Hasyim tidak memilih NU. Jadi, faktor lingkungan dan keluarga tampaknya sangat menentukan di sini. Memang, ada tulisan Wahid Hasyim berjudul "Mengapa Saya Memilih NU" di mana dia menyebutkan beberapa alasan dipilihnya NU. Tapi keaslian tulisan tersebut patut dipertanyakan mengingat tulisan tersebut muncul setelah ia wafat.<sup>3</sup>

Karir pertama Wahid Hasyim dalam NU adalah menjadi sekretaris NU ranting Cukir, tingkatan

paling bawah dalam struktur organisasi NU. Tidak lama kemudian dia langsung menjadi Ketua NU Cabang Jombang. Dua tahun kemudian dia diserahi tugas memimpin Bagian Ma'arif (pendidikan dan pengajaran) dari Pengurus Besar NU yang berkedudukan di Surabaya.

Selama aktif di NU, Wahid Hasyim juga aktif menulis di penerbitan-penerbitan NU, seperti *Suara NU* yang menggunakan huruf Arab *pegon*, dan *Berita NU* yang menggunakan huruf latin. Bahkan dia sendiri kemudian menerbitkan dan memimpin *Suluh NU* yang khusus digunakan untuk menyebarluaskan ide-ide pembaruan dalam bidang pendidikan Islam. Lewat media-media tersebut, Wahid Hasyim menggugah kesadaran warga NU akan pentingnya pendidikan dalam arti luas.

### Mentransformasi Peran Kiai

Bermula dari kedudukannya sebagai pengurus NU, Wahid Hasyim kemudian aktif di Masyumi, *Shumubu* (Kantor Urusan Agama), BPUPKI dan PPKI.

Ketika Jepang menduduki nusantara, menggantikan Belanda, ia melarang semua organisasi yang ada, baik yang bersifat politik, sosial maupun keagamaan. Dua organisasi yang kemudian diizinkan tetap beroperasi adalah NU dan Muhammadiyah. Berbeda dengan penjajah sebelumnya, Jepang memilih bekerjasama dengan kalangan agama, khususnya umat Islam. Untuk itu umat Islam kemudian mendapatkan banyak

<sup>3</sup> Dalam tulisan tersebut, Wahid Hasyim menjelaskan, paling tidak ada empat faktor yang menyebabkan dia bergabung dengan NU. Pertama, keberhasilan NU mengembangkan organisasi dalam waktu singkat dan meliputi daerah yang luas. Kedua, anggotanya punya mentalitas tinggi, meski tidak punya kaum terpelajar yang banyak. Ketiga, NU memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Dan keempat, adanya ulama yang terus menjaga ajaran Islam. Faktor kiai, yang dulunya dianggap sebagai penghambat keberhasilan NU, justru menjadi kunci keberhasilannya. Lihat Aboebakar, *op. cit.*, hal. 739-741. Namun secara keseluruhan, sulit memperlakukan tulisan tersebut sebagai alasan riil bergabungnya Wahid Hasyim dalam NU. Apalagi jika dilihat bahwa tulisan tersebut muncul dalam *Gema Muslimin*, November 1953, atau lebih dari enam bulan setelah Wahid Hasyim wafat. Selain itu, Aboebakar sendiri menyantumkan catatan bahwa tulisan tersebut disusun oleh A. Sjahri, Sekjen PBNU saat itu. Untuk itu, sangat mungkin bahwa tulisan tersebut dibuat untuk kepentingan kampanye Partai NU menjelang Pemilu 1955. Hal ini karena sejak 1953 NU memutuskan untuk memisahkan diri dari Partai Masyumi dan menjadi partai politik sendiri.

“konsesi” dan menggantikan “posisi” kalangan bangsawan dan priyayi pada masa Belanda. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat Jepang yang menerapkan kebijakan memilih bekerjasama dengan kalangan agama di daerah-daerah yang didudukinya. Wahid Hasyim yang saat itu bisa dikatakan sebagai *the rising star* NU, segera mendapat kesempatan menduduki beberapa pos penting.

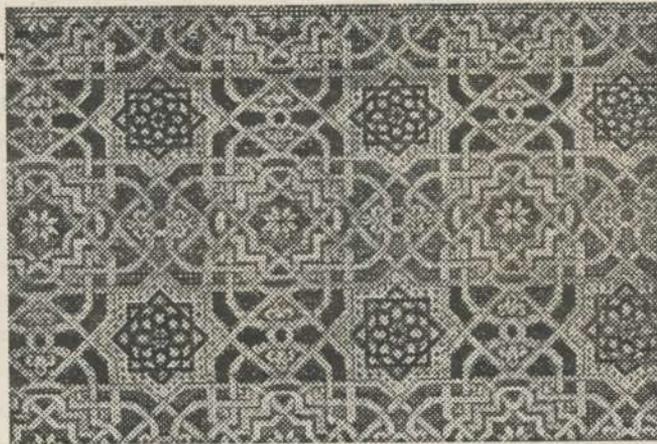
Pos pertama yang diduduki Wahid Hasyim adalah Wakil Ketua Masyumi, sementara Ketua Masyumi dijabat ayahnya, K.H. Hasyim Asy'ari. Karena K.H. Hasyim Asy'ari tetap memilih tinggal di Jombang, memimpin pondok pesantrennya, maka yang menjalankan tugas sehari-hari adalah Wakil Ketua. Ada dua Wakil Ketua, yakni Wahid Hasyim dan K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah. Namun pada Januari 1944, K.H. Mas Mansur mengundurkan diri dari jabatannya karena kegiatan-kegiatan politiknya. Sebagai penggantinya, diangkat Abdul Mukhti. Penggantian tersebut menjadikan posisi Wahid Hasyim lebih dominan dalam memimpin organisasi ini.<sup>4</sup>

Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) pertama kali didirikan pada Oktober 1943 sebagai ganti dari MIAI (Majlis al-Islam al-A'la Indonesia). MIAI sendiri yang didirikan pada 1937 dalam Kongres Islam adalah federasi organisasi-organisasi Islam yang sangat anti kolonial dan non kooperatif dengan penjajah. Karena latar belakang itulah pemerintah Jepang merasa perlu

membubarkan organisasi ini dan menggantinya dengan Masyumi karena khawatir bahwa karakter anti penjajah tadi akan berubah menjadi anti Jepang.<sup>5</sup> Dengan demikian, keberadaan Masyumi yang kelahirannya atas inisiatif Jepang tersebut diharapkan tidak akan menentang, bahkan kalau bisa mendukung, keberadaan Jepang di Indonesia.

Jabatan kedua yang dipegang Wahid Hasyim pada masa pendudukan Jepang adalah menjadi Wakil Kepala *Shumubu*, atau Kantor Urusan Agama pusat. Sekali lagi, di sini yang menjabat kepalanya adalah K.H. Hasyim Asy'ari. Dan karena alasan yang sama, Wahid Hasyim-lah yang bertindak sebagai pelaksana sehari-hari, bersama-sama Abdul Kahar Muzakkir dari Muhammadiyah. Atas permintaan ayahnya, Wahid Hasyim bertindak sebagai wakil ayahnya secara permanen. Dengan demikian, pengaruh Wahid Hasyim dalam kantor ini juga menjadi makin penting.

*Shumubu* dapat dikatakan kelanjutan dari *Kantoor vor Inlandse Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) pada masa Belanda. Pembentukan *Shumubu* juga terkait erat dengan kebijakan Jepang dalam menangani umat Islam di Indonesia. Lembaga ini pertama kali dipimpin orang Jepang, Kol. Horie, kemudian digantikan Hoesain Djajadiningrat. Sesuai dengan perubahan kebijakan Jepang yang lebih konsiliatori terhadap kalangan Islam, lembaga ini mengalami reorganisasi; K.H. Hasyim Asy'ari kemudian diangkat sebagai Kepala *Shumubu*. Kantor inilah yang bertanggung jawab



<sup>4</sup> Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation* (The Hague: W.van Hoeve, 1958). hal 262-263, note 6.

<sup>5</sup> Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Hijhoff, 1982), hal. 11.

menghubungkan antara pihak pemerintah dan kalangan Islam, sekaligus menyampaikan propaganda pemerintah Jepang kepada penduduk pribumi. Karena itu, beberapa latihan, seperti *Latihan Kiai* dan *Latihan Guru Madrasah*, yang semuanya bertujuan agar para peserta memahami dan mendukung posisi Jepang, dikoordinasi oleh lembaga ini.<sup>6</sup>

Dengan menerima jabatan dalam kedua lembaga tersebut, tidak langsung berarti bahwa Wahid Hasyim menjadi kolaborator Jepang. Memang keduanya adalah kreasi Jepang dan pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung keberadaan pemerintah penjajah. Namun, Wahid Hasyim mempunyai agenda tersendiri dengan aktif dalam kedua lembaga tadi. Dia mengatakan: "Dalam setiap perjuangan saling menipu pasti terjadi... Di kalangan santri, 'Nippon' dalam bahasa Jepang harus diucapkan 'Nippong' yang berarti 'nipu wong'. Mereka bilang, mereka ingin membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Mungkin benar bahwa kita tidak akan dijajah lagi oleh Belanda, tetapi mereka tidak memberi tahu kita apakah kita akan merdeka atau mereka akan menjajah kita setelah kita bebas dari Belanda. Ini adalah penipuan. Mengapa kita tidak menipu mereka?"<sup>7</sup>

Dia menerima "kebaikan" Jepang, tapi ia gunakan untuk kepentingan bangsa sendiri. Lebih jauh dia mengatakan: "Prinsip kita adalah untuk membantu diri kita sendiri. Kita membantu diri kita sendiri melalui kesempatan yang mereka berikan kepada kita. Mungkin, mereka akan menggunakan kita sebagai alat. Tetapi kita bukan alat yang diam. Apa yang penting di sini adalah menggunakan kesempatan yang mereka berikan kepada kita sebanyak mungkin."<sup>8</sup>

Dari jabatannya di *Shumubu* tersebut, Wahid Hasyim berhasil melakukan transformasi besar-besaran peran kiai.<sup>9</sup> Kalau pada masa Belanda tidak ada kiai yang mempunyai jabatan di pemerintahan, pada masa Jepang banyak kiai dan ulama menjadi Kepala *Shumuka* (Kantor Urusan Agama di tingkat Kabupaten) setelah mengikuti *Latihan Kiai* atau *Latihan Guru Madrasah*. Akibatnya, mereka lalu terlibat dalam masalah politik atau pemerintahan sekaligus menyadari akan pentingnya dua sektor tersebut. Kesadaran berpolitik di kalangan kiai NU yang dipelopori Wahid Hasyim ini jelas turut andil dalam mewarnai perjalanan NU yang kemudian aktif dalam kegiatan politik, bahkan menjadi partai politik tersendiri.

### Muslim Yang Demokrat

Berkat peran menonjol Wahid Hasyim tersebut, ketika Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dia menjadi salah satu anggota dan yang termuda. Sebagaimana diketahui, ketika posisi Jepang makin terdesak oleh tentara Sekutu di beberapa wilayah, mereka menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, dengan harapan mendapat bantuan rakyat Indonesia dalam peperangan yang diperkirakan akan pecah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebab itu, badan ini diberi tugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. Badan ini mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama berlangsung pada 28 Mei sampai 1 Juni 1945 dan kedua pada 10-17 Juli 1945.

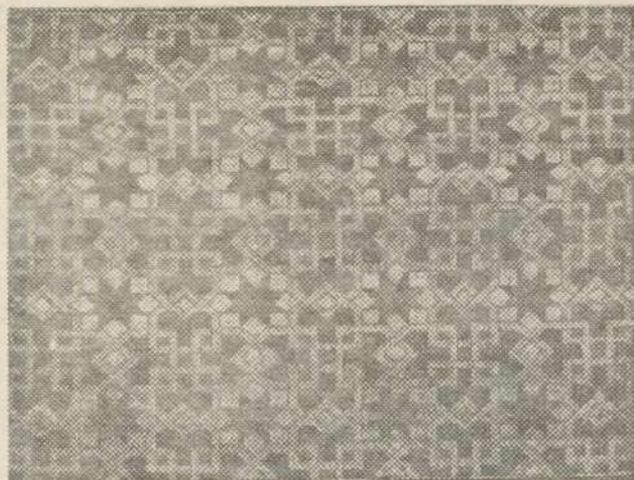
Dalam sidang pertama, badan ini membicarakan dasar-dasar negara Indonesia yang akan lahir. Dalam rapat ini, Wahid Hasyim termasuk kelompok yang menghendaki agar

<sup>6</sup> C.A.O van Nieuwenhuijze, *Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia* (The Hague: W. van Hoeve, 1958), hal. 109-159. Lihat juga Kobayashi Yasuko, "Kyai and Japanese Military," *Studia Islamika*, Vol. 4, No. 3, 1997, hal. 89-92.

<sup>7</sup> Saifuddin Zuhri, *Gurukn Orang-orang dari Pesantren*, (Bandung: Almaarif, t.t.), hal. 173

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Kobayashi Yasuko, *op cit.*



negara yang akan dibentuk berdasarkan Islam mengingat Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia. Mereka dikenal dengan golongan Islam. Sementara itu, sebagian peserta lain menghendaki agar negara yang akan dibentuk tidak berdasarkan pada agama tertentu karena adanya fakta bahwa selain umat Islam terdapat pula penganut agama lain di Nusantara ini. Yang terakhir ini dikenal dengan golongan nasional—meski sebagian besar anggota golongan ini juga beragama Islam. Rapat ini berakhir dengan dibentuknya Panitia Sembilan—di mana Wahid Hasyim menjadi salah satu anggotanya—yang bertugas merumuskan hasil akhir berdasarkan usulan-usulan peserta sidang.

Panitia kecil ini akhirnya berhasil merumuskan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian lebih dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam piagam tersebut, tercantum satu kalimat yang di kemudian hari menimbulkan kontroversi, yakni sila pertama: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Bagi Panitia Kecil, rumusan ini dianggap sebagai jalan tengah yang

paling maksimal dari kedua aspirasi besar tadi.

Dalam rapat kedua yang mestinya membicarakan isi Undang-Undang Dasar sempat diawali dengan perdebatan sekitar Piagam Jakarta tersebut tadi. Namun berkat campur tangan Soekarno, isi piagam tersebut dapat diterima sebagaimana adanya. Selanjutnya mereka membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sekali lagi, Wahid Hasyim menjadi bagian dari mereka yang mengusulkan agar negara berdasarkan Islam. Mereka, antara lain, mengusulkan agar Presiden harus orang Indoensia asli dan beragama Islam. Dalam pasal lain, diusulkan pula bahwa agama negara adalah Islam. Setelah perdebatan yang panjang, kalangan nasionalis atas himbauan Soekarno menerima tuntutan umat Islam saat itu. Peran Wahid Hasyim dalam BPUPKI ini dicatat dengan tepat oleh Benda yang mengatakan bahwa Wahid Hasyim adalah “wakil Islam Indonesia yang paling berpengaruh pada masa Jepang.”<sup>10</sup>

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa Wahid Hasyim dalam batas-batas tertentu adalah orang yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam, sehingga ia selalu mengusulkan agar Indonesia menjadi negara yang berdasarkan Islam. Namun Islam bukan harga mati bagi dia. Ini terbukti ketika pada satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, Wahid Hasyim tanpa berbelit-belit dapat menerima usulan yang diajukan Moh. Hatta agar segala rumusan yang memuat Islam secara eksplisit dihapuskan dari Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar, karena disinyalir ada keberatan dari penduduk Indonesia bagian timur yang tidak ingin bergabung dengan Indonesia merdeka jika berdasarkan Islam.<sup>11</sup> Di sinilah peran Wahid Hasyim cukup penting dalam ikut menyelamatkan persatuan bangsa Indonesia.

<sup>10</sup> Benda, *op. cit.*, hal. 189.

<sup>11</sup> Memang terjadi perbedaan pendapat, apakah Wahid Hasyim hadir dalam rapat tanggal 18 Agustus 1945 itu. Prawoto mengatakan tidak karena Wahid Hasyim sedang berada di luar Jakarta, sementara Hatta yakin dia ada dalam rapat tersebut. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Grafiti, 1987), hal. 39-43. Tapi Andrée Feillard yang menulis tentang NU berani memastikan bahwa Wahid Hasyim hadir dalam rapat tersebut. Lihat Johan Hendrik Meuleman, “NU: Pergumulan Islam dan ABRI di Masa Kontemporer,” *Studia Islamika*, Vol. 4 No. 1, 1997, hal. 220, cf 4.

Tidak terbayangkan apa yang terjadi seandainya Wahid Hasyim menolak usulan tersebut—suatu hal yang secara teoritis sangat mungkin jika melihat perannya selama sidang BPUPKI. Namun semua itu tidak terjadi karena bagi Wahid Hasyim, persatuan bangsa yang baru saja merdeka jauh lebih penting daripada pengakuan formal terhadap Islam. Bahkan sebelum sidang BPUPKI, Wahid bahkan telah menekankan hal ini: Sejarah masa lampau kami telah menunjukkan bahwa kami belum mencapai kesatuan. Demi pentingnya kesatuan ini, yang sangat kami perlukan secara mendesak dan dalam usaha untuk membangun negara Indonesia kita, di dalam pikiran kami pertanyaan yang terpenting bukanlah “Di manakah akhirnya tempat Islam [di dalam negara itu]?” akan tetapi pertanyaan yang terpenting adalah “Dengan jalan manakah akan kami jamin tempat agama [kami] di dalam Indonesia Merdeka?” Karena itu sekali lagi saya ulangi: Yang sangat kita butuhkan saat ini adalah persatuan bangsa yang tak terpecahkan.<sup>12</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Wahid Hasyim adalah seorang muslim yang demokrat. Sebagai seorang muslim, dia teguh memperjuangkan Islam, tapi sebagai seorang demokrat, dia juga dapat menerima usulan lain, demi kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dipegangnya, bahwa “tiap-tiap Muslim mesti demokrat, karena agama Islam adalah agama demokratis.”<sup>13</sup> Sifat demokrat tersebut juga bisa dilihat dari fakta bahwa Wahid Hasyim tidak pernah mempersoalkan lagi dasar negara yang disahkan pada 18 Agustus tadi. Yang dilakukan Wahid Hasyim justru adalah bagaimana

menempatkan aspirasi kalangan agama, tidak hanya Islam, dalam negara Indonesia modern melalui institusi Kementerian Agama.

### Mengembangkan Kementerian Agama<sup>14</sup>

Meski Kementerian Agama telah didirikan pada Januari 1946, tapi dapat dikatakan bahwa Wahid Hasyim-lah yang meletakkan fondasi kuat kementerian ini sehingga mampu berkembang seperti sekarang ini. Hal ini karena sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada Desember 1949, kementerian ini lebih banyak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Islam secara langsung, seperti masalah nikah, talak, rujuk, dan wakaf. Hal ini menjadikan posisi kementerian ini waktu itu dianggap kelas dua jika dibandingkan dengan kementerian-kementerian teknis lainnya. Selain itu, mengingat kondisi politik dalam negeri belum stabil karena Belanda belum mengakui kemerdekaan RI, kementerian ini juga belum mampu mengembangkan program-programnya.

Wahid Hasyim diangkat menjadi Menteri Agama pada 20 Desember 1949, dalam kabinet RIS, dengan Perdana Menteri Moh. Hatta. Meski usianya masih muda, sekitar 35 tahun, tapi itu bukan kali pertama Wahid Hasyim menjadi menteri. Sebelumnya, ia telah dua kali menjadi menteri, yakni Menteri Negara pada Kabinet Soekarno 1945 dan Sjahrir III 1946-7. Dengan demikian, Wahid Hasyim bukan orang baru lagi dalam pemerintahan. Dalam urusan kementerian ini pun, paling tidak dia sudah punya pengalaman pada masa Jepang, ketika dia menjabat Wakil Kepala *Shumubu*.

Pada saat itu, paling tidak ada dua Kementerian

<sup>12</sup> “Agama dalam Indonesia Merdeka,” dalam *Indonesia Merdeka*, 1, 3 (25 Mei 1945), hal. 3, sebagaimana dikutip dalam Benda, *op cit*, hal. 189.

<sup>13</sup> H. Aboebakar, *op. cit.*, hal 887.

<sup>14</sup> Lebih jauh tentang peran Wahid Hasyim dalam mengembangkan Departemen Agama, lihat Saiful Umam, “K.H. Wahid Hasyim, Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi,” dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.), *Menteri-Menteri Agama: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: Badan Litbang Depag dan PPIM-IAIN Jakarta, 1998), hal. 85-98.

Agama sebagai konsekuensi dari adanya dua pemerintahan: RIS yang berkedudukan di Jakarta dan RI di Yogyakarta. Perdana Menteri RI saat itu adalah A. Halim, sedang Menteri Agamanya dijabat K.H. Faqih 'Usman. Dalam masa-masa awal, Wahid Hasyim selalu mengadakan koordinasi dengan Kementerian Agama di Yogyakarta. Dualisme kementerian ini memang cukup menjadi hambatan bagi pengembangan peran Kementerian Agama. Karena itulah kemudian diadakan pembicaraan di antara kedua Menteri yang juga menyertakan para pejabat di lingkungan masing-masing dalam usaha menyatukan kedua kementerian ini. Upaya ini semakin intensif dilakukan setelah terjadi kesepakatan bersama antara Hatta dan A. Halim untuk membentuk Negara Kesatuan pada 19 Mei 1950.

Akhirnya, lewat Surat Keputusan No. A II/2/2175 tertanggal 7 Juni 1950 yang ditandatangani Wahid Hasyim dan Faqih 'Usman, dicapailah kesepakatan untuk menyatukan kedua kementerian tersebut dan pegawai kedua kementerian pun dilebur menjadi satu. Meski status pemerintahan RI di Yogyakarta adalah bagian dari RIS, keberadaan Kementerian Agama di sana dijadikan modal dasar untuk pengembangan Kementerian ini, mengingat ia sudah ada lebih dulu dan telah mempunyai berbagai perangkat serta menghasilkan berbagai keputusan. Namun kantor pusat kementerian ini berkedudukan di Jakarta, dengan bagian-bagian tertentu tetap di Yogyakarta, seperti Jawatan (setingkat Direktorat) Urusan Agama, Jawatan Pendidikan Agama dan Jawatan Penerangan Agama.

Dengan disatukannya Kementerian Agama, Wahid Hasyim mulai melakukan restrukturisasi kementerian ini, meliputi struktur organisasi dan lapangan pekerjaan. Dengan program ini, struktur dan lapangan pekerjaan Kementerian Agama menjadi luas, sehingga jumlah personalia juga

berubah drastis. Tidak lagi tujuh orang seperti ketika Wahid Hasyim pertama kali menjadi Menteri Agama RIS, tetapi mencapai ribuan. Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kementerian ini pun bertambah besar. Semua itu berarti menuntut penanganan lebih serius, dan tidak bisa lagi dianggap sekedar pelengkap, seperti ketika masa RIS.

Salah satu tantangan berat yang dihadapi Wahid Hasyim adalah mempertahankan eksistensi kementerian ini. Meski keberadaannya sudah disahkan Presiden pada awal 1946, kementerian ini selalu mendapat kritikan tajam dan bahkan tuntutan agar dibubarkan dengan berbagai alasan. Ketika masa revolusi, tuntutan tersebut nyaris tidak terdengar karena semua disibukkan oleh permasalahan lebih besar, yakni menghadapi Belanda. Namun ketika Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama, di mana kondisi keamanan negara sudah terbebas dari ancaman Belanda, tuntutan tersebut kembali mengemuka. Dengan demikian, tugas Wahid Hasyim adalah bagaimana meyakinkan mereka bahwa kementerian ini penting dan sekaligus mempertahankan keberadaannya.

Mereka yang menuntut dibubarkannya kementerian ini beralasan bahwa tugas-tugas yang diemban kementerian ini bisa ditangani kementerian-kementerian lain yang sudah ada, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kehakiman. Keberadaan Kementerian Agama, menurut mereka, hanya pemborosan anggaran negara saja. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa kementerian ini hanyalah ajang rebutan jabatan antar partai, sehingga tidak ada alasan kuat untuk melanjutkan keberadaannya.<sup>15</sup>

Wahid Hasyim dengan teguh mempertahankan keberadaan Kementerian Agama sekaligus menolak argumen mereka yang menghendaki pembubaran kementerian ini. Menurut dia, dengan

<sup>15</sup> *Laporan Sejarah Departemen Agama* (Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan Departemen Agama RI, 1980/1981), hal. 47

adanya Kementerian Agama, pemerintah merasa wajib melayani keperluan rakyat tentang agama, dengan dasar Pancasila. Pemisahan agama dan negara, menurut Wahid Hasyim, hanya terjadi dalam teori. Dalam kenyataannya, tak ada satu pun yang betul-betul mempraktekkan pemisahan tersebut, kecuali negara ateis. Wahid Hasyim mengingatkan bahwa penghapusan kementerian ini dapat saja dilakukan, dan berbagai fungsinya dilaksanakan berbagai kementerian lain, namun hal itu pasti akan menyinggung perasaan umat Islam Indonesia.

Sementara itu, terhadap keberatan kalangan non Muslim bahwa kementerian ini lebih banyak memperhatikan umat Islam, Wahid Hasyim menunjukkan adanya fakta bahwa jumlah penganut Islam jauh lebih besar daripada non-Muslim. Jadi, wajar kalau Kementerian Agama memberikan perhatian lebih besar kepada umat Islam. Tapi hal itu dilakukan bukan karena diskriminasi, melainkan semata karena jumlah umat Islam yang sangat besar itu.<sup>16</sup> Dari pernyataan terakhir ini, Wahid Hasyim menegaskan bahwa Kementerian Agama bukanlah kementerian bagi umat Islam saja, tapi bagi semua pemeluk agama.

Selain mempertahankan eksistensi Kementerian Agama, jasa Wahid Hasyim yang perlu dicatat selama menjadi Menteri Agama adalah mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta. Lewat Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950, Fakultas Agama di Universitas Islam Indonesia dikembangkan menjadi PTAIN. Peresmian lembaga pendidikan tinggi ini sendiri dilakukan pada 15 September 1951.

Dalam sambutannya ketika meresmikan perguruan ini, Wahid Hasyim menjelaskan bahwa pendirian lembaga ini dilatarbelakangi beberapa

hal. Antara lain, keprihatinan dia akan rendahnya kualitas sumber daya manusia di kalangan umat Islam. Padahal, mereka adalah kelompok terbesar. Karena kelemahan kualitas yang mereka hadapi, kelompok mayoritas ini tidak akan mampu menyukseskan pembangunan yang dilakukan dalam waktu yang cepat. Selain itu, pendirian ini juga didorong oleh fakta bahwa umat Islam belum mempunyai sekolah yang mengajarkan dan memelihara pendidikan agama Islam dengan dasar pengetahuan setingkat universitas. Sementara, kelompok minoritas sudah mempunyainya, dalam bentuk Sekolah-sekolah Tinggi Theologia.

Di samping kedua latar belakang tersebut, dia juga mengemukakan bahwa dalam masyarakat saat itu dijumpai dua macam pimpinan Islam. Pertama, pemimpin politik Islam yang umumnya berpendidikan Barat tapi tidak punya pengetahuan agama yang cukup. Kedua, pemimpin agama Islam, yakni para ulama yang pada umumnya tidak mempunyai pengetahuan umum dan politik. Sebab itu, Wahid Hasyim mengharapkan bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam tersebut mampu melahirkan cendekiawan yang tidak hanya mendalam ilmu pengetahuan agama dan umumnya serta takwanya kepada Allah tapi juga memahami persoalan-persoalan politik. Dengan demikian, tidak akan terjadi adanya ulama yang, karena tidak sadar, menundukkan ilmu pengetahuan pada politik.<sup>17</sup>

PTAIN inilah, setelah digabungkan dengan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Ciputat, kemudian dikembangkan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang sekarang mencapai 14 di seluruh Indonesia, dan mampu menyerap lebih dari 15 persen dari jumlah keseluruhan mahasiswa Indonesia.<sup>18</sup>

Selain pendirian PTAIN, peninggalan penting

<sup>16</sup> Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 340-341. Lihat juga Deliar Noer, *Administration of Islam in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, 1978), hal. 13-15.

<sup>17</sup> H. Aboebakar, *op. cit.*, hal. 812-818.

<sup>18</sup> Untuk sejarah perkembangan IAIN dan prospek masa depannya, lihat *The Baseline Study of IAIN: The Guidelines of IAIN Development Plan for the Twenty-five Years* (Jakarta: Censis dan Dabinperta, 1996).

lainnya dari Wahid Hasyim adalah didirikannya Sekolah Guru Agama Islam (SGAI)—kemudian diubah menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN)—di hampir setiap kabupaten.<sup>19</sup>

Usaha penting Wahid Hasyim yang perlu dicatat juga ketika dia menjadi Menteri Agama adalah penanganan urusan haji. Sejak dia menjadi Menteri Agama, pelaksanaan ibadah haji dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, yakni Bagian Urusan Haji dari Kementerian Agama yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan PHI (Yayasan Perjalanan Haji Indonesia). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggaraan haji dan juga menyelamatkan calon jamaah dari tipuan pihak-pihak tertentu yang ingin mengeksploatasikan mereka. Penipuan pernah terjadi pada 1949 terhadap jamaah haji dari Jawa Barat. Banyak dari mereka yang terlantar ketika di Arab dan kemudian menimbulkan kekacauan.<sup>20</sup>

Selain itu, dalam setiap musim haji disertakan pula petugas kesehatan untuk menjaga kesehatan para jamaah dan petugas yang diangkat Kementerian Agama. Petugas terakhir ini menangani berbagai hal, mulai dari membimbing jamaah, mengatur dan mengurus masalah-masalah teknis—baik selama dalam perjalanan maupun di Arab—sampai mengurus jamaah yang meninggal, berikut barang-barang bawanya. Meski sistem rekrutmen tenaga-tenaga tersebut di kemudian hari mendapat banyak kritikan,<sup>21</sup> tapi ide dasar kebijakan ini jelas untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji.

Satu lagi kebijakan Wahid Hasyim yang perlu dicatat adalah dimulainya pelaksanaan perayaan hari besar Islam secara kenegaraan, tepatnya adalah Peringatan Maulid Nabi yang diadakan di Istana

Negara pada 2 Januari 1950. Sejak saat itu, peringatan tersebut selalu diadakan di tempat yang sama dan dihadiri Kepala Negara.<sup>22</sup>

Dari apa yang dilakukan Wahid Hasyim, mulai dari mempertahankan eksistensi Kementerian Agama sampai mengembangkannya seperti disinggung di atas, pantaslah bila dikatakan bahwa Wahid Hasyim peletak fondasi yang kokoh bagi kementerian ini. Pada masa dialah, Kementerian Agama menemukan formatnya yang pas dalam kiprahnya di negara-bangsa Indonesia yang modern. Tidak berlebihan, saya kira, kesimpulan Bolland yang menyatakan bahwa “Wahid Hasyimlah yang mengorganisir Kementerian Agama sehingga menjadi penting dan meninggalkan jejaknya di situ.”<sup>23</sup>

Wahid Hasyim sendiri berhasil melaksanakan dengan baik semua kebijakan tersebut karena didukung oleh dua hal. Pertama, adanya stabilitas negara. Sebagaimana diketahui, sejak akhir 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan sejak itu tidak ada lagi agresi. Hal ini menjadikan pemerintahan RI tidak lagi sibuk mengurus perjuangan, sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada penataan pemerintahan dan pelaksanaan program-programnya. Kedua, Wahid Hasyim menduduki jabatan ini dalam waktu yang relatif cukup lama. Dalam situasi ketika suatu kabinet selalu silih berganti dalam waktu yang pendek, Wahid Hasyim mendapat kepercayaan untuk memegang posisi ini secara berturut-turut dalam tiga kabinet: Kabinet Hatta (1949-1950), Natsir (1950-1951) dan Sukiman (1951-1952). Dalam rentang waktu tersebut, kontinuitas program-program dia dapat dijaga. ❖❖

<sup>19</sup> H. Aboebakar, *op. cit.*, hal. 631.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 648.

<sup>21</sup> Lihat Deliar Noer, *Administration of Islam*, hal. 53-64.

<sup>22</sup> *Laporan Sejarah Departemen Agama*, hal. 48.

<sup>23</sup> B.J. Bolland, *op. cit.*, hal. 10.